

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM LAYANAN DAN
RUJUKAN TERPADU PENANGANAN KEMISKINAN DI
KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi
Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

OLEH:
EKO PUTRA PERDANA
1710842017



Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc, Sc**
- 2. Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP, MPA**

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

ABSTRAK

Eko Putra Perdana, 1710842017, Implementasi Kebijakan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan Di Kota Padang, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2024 yang dibimbing oleh Dr. Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc.Sc dan Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP, MPA. Skripsi ini terdiri dari 176 halaman dengan referensi 10 buku teori, 3 buku metode, 3 skripsi, 4 jurnal, 1 undang undang, 1 Peraturan Menteri, 1 peraturan direktorat jenderal, 1 peraturan Walikota, 3 website internet.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagai upaya Kota Padang dalam mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Padang. Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu ini dibentuk dengan dasar Peraturan Wali Kota Padang No 72 Tahun Tahun 2020 Tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan dan Pusat Kesejahteraan Sosial. SLRT merupakan sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan di daerah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling, pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) yang terdiri dari 6 variabel utama dan data diolah menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan Di Kota Padang belum berjalan dengan optimal karena adanya kendala pada beberapa variabel seperti: pada variabel standar dan sasaran kebijakan berupa kurangnya pemahaman petugas tentang dasar aturan kebijakan; pada variabel sumber daya berupa masih terbatasnya insentif bagi petugas fasilitator dan petugas Puskesmas SLRT dari pendamping PKH dan TKSK, belum tersedianya fasilitas ruang pelayanan yang memadai untuk Puskesmas Kelurahan, dan belum tersedianya sarana sistem aplikasi SLRT untuk fasilitator; pada variabel karakteristik agen pelaksana berupa belum adanya SK pembentukan Puskesmas oleh Lurah; pada variabel lingkungan sosial, ekonomi, politik berupa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur pelayanan pengurusan bansos, dan ketidaktahuan masyarakat kelurahan terhadap adanya Puskesmas di Kelurahan mereka. Sedangkan variabel lain seperti ketersediaan sumber daya manusia pada Puskesmas SLRT Kota dan Kelurahan, ketersediaan sumber daya sarana prasarana pada Puskesmas SLRT Kota, karakteristik agen kebijakan, dan komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan sudah memadai dan dapat mendukung kinerja implementasi kebijakan.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu, Pelayanan

ABSTRACT

Eko Putra Perdana, 1710842017, Implementation of Integrated Service and Referral System Policy for Handling Poverty in Padang City, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2024 supervised by Dr. Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc, Sc and Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP, MPA. This thesis consists of 176 pages with references to 10 theory books, 3 method books, 3 theses, 4 journals, 1 law, 1 ministerial regulation, 1 directorate general regulation, 1 mayoral regulation, 3 internet websites.

This research is motivated by The Integrated Service and Referral System (SLRT) Policy that have been implemented by Padang City Government as an effort to make an integrated social welfare service and accelerate poverty reduction in Padang City. This Integrated Service and Referral System (SLRT) was formed on the basis of Padang Mayor Regulation No. 72 of 2020 concerning the Integrated Service and Referral System for Handling Poverty and Social Welfare Centers. SLRT is a service system that identifies the needs and complaints of the poor and underprivileged people and makes referrals to any institution that manages social assistance programs for the poor and underprivileged at regional and national levels.

This study used descriptive qualitative method. Data was collected through interviews with informants selected using purposive sampling techniques, data collection was carried out through observation and documentation. This research uses the theory of Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn (1975) which consists of 6 main variables and the data is processed using the Miles and Huberman data analysis technique.

The results of this research indicate that the implementation of the Integrated Service and Referral System (SLRT) Policy for Handling Poverty in Padang City has not run optimally due to constraints on several variables such as: on the standard variables and policy targets in the form of a lack of understanding by SLRT petugas about the basic policy rules; on the resource variable in the form of insufficient incentives for facilitator officers, and there is no provision of incentives for SLRT officers who appointed from PKH and TKSK assistants, and the lack of adequate service room facilities for Puskesmas Kelurahan, and the unavailability of SLRT application system facilities for facilitators; on the characteristic variable of the implementing agent in the form of the absence of a Decree on the establishment of Puskesmas Kelurahan by the District Head; on social, economic and political environmental variables in the form of a lack of understanding by the public about social assistance program procedures, and the public in Kelurahan Rawang and Kelurahan Jati does not know about the existence of Puskesmas Kelurahan. Meanwhile, other variables such as human resource availability on Puskesmas Kota and Puskesmas Kelurahan, facility resources availability on Puskesmas SLRT Kota, characteristics of policy agents, and communication between organizations and implementation activities are adequate and can support the performance of policy.

Keywords: Policy implementation, Integrated Service and Referral System, Service